

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

Banyak yang bersikap skeptik kepada pemerintah berkaitan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian secara resmi menonaktifkan organisasi massa sempalan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tersebut muncul bersamaan dengan perasaan curiga, terutama bagi oposisi pemerintahan Joko Widodo. Mereka beranggapan bahwa dengan terbitnya Perppu tersebut mencederai proses demokrasi dengan menghubungkan pada unsur dasarnya, yaitu kemerdekaan berpikir, berhimpun, dan berekspresi. Tudingan ini serius, hingga berlanjut pada meja hijau. Pemerintah beralasan bahwa keputusan tersebut sudah dikaji dan dipertimbangkan secara matang dengan dalih bahwa HTI melanggar undang-undang dan hanya melahirkan perdebatan yang tidak produktif di tengah-tengah publik. Alasan terakhir ini mengindikasikan upaya stabilitas terhadap iklim perpolitikan.

Keseriusan pemerintahan Jokowi dalam rangka menstabilisasi iklim politik di Indonesia tidak hanya dilihat saat ia mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang menjustifikasi situasi genting dan memaksa. Tetapi jauh daripada itu, komitmen pemerintah dalam proses tersebut sebetulnya sudah masuk dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Salah satunya adalah melakukan revolusi karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air. Selain itu, program yang diutamakan adalah pemerataan pembangunan yang

tertuang pada poin nomor tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Narasi yang terakhir ini tidak akan terlaksana secara optimal jika situasi politik dalam negeri tidak kondusif, sehingga dirasa perlu untuk ditertibkan. Mengutip Guillermo O'Donnell, ia memandang negara sebagai suatu variabel penting yang dapat melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan negara dalam konteks ini adalah menertibkan unsur yang dirasa menghambat proses tersebut, salah satunya adalah HTI. Sebagaimana penuturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ia mengatakan bahwa HTI selain berbahaya karena melakukan makar terhadap negara, faktor lain adalah mereka dinilai tidak memberikan sumbangsih positif terhadap negara.⁶² Selain itu pendekatan birokratisme-otoriter ini juga nampak saat Tjahjo Kumolo mengeluarkan kebijakan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam struktur Hizbut Tahrir Indonesia agar segera mengundurkan diri.⁶³

Kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan gagasan Guillermo O'Donnell terutama pada gagasan pertama yaitu tidak berlakunya hipotesa yang menghubungkan modernisasi dan demokratisasi. Demokrasi, sebagaimana kita ketahui bersama salah satu unsur pokoknya adalah kebebasan berekspresi. Hak dasar ini yang dihilangkan dalam proses ini sebagai bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Metode otoritarianisme-birokratik yang menekankan pada stabilitas iklim politik nampaknya berhasil dijalankan pemerintah melalui

⁶²CNN.com diakses tanggal 24 April 2018 pukul 21.00

⁶³Kompas.com diakses tanggal 24 April 2018 pukul 21.00

kebijakan tersebut. Modernisasi dalam kasus ini menihilkan hak tunggal tersebut dalam rangka semangat pembangunan.

Hal sama juga bisa kita saksikan pada ranah akademik, melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir. Evaluasi terhadap sivitas akademika di lingkungan kampus seluruh Indonesia dilakukan, jika terindikasi terlibat dengan agenda HTI maka yang bersangkutan bisa dicabut statusnya sebagai pengajar.⁶⁴ Dalam kasus ini, pendidikan sebagai tonggak peradaban tidak dilihat sebagai unsur yang kebal dari intervensi politik yang merupakan bagian dari agenda kerja pemerintah. Pendekatan yang sama terhadap pemerintah juga diberlakukan pada dunia pendidikan, utamanya universitas. Kentalnya nuansa politis dalam menjalankan visi besar pemerintah di atas adalah bagian dari apa yang disebut oleh Guillermo O'Donnell sebagai "Koalisi Politik Dominan", yang menggabungkan seluruh unsur pemerintah dalam upaya mensukseskan agenda besar pemerintah, yakni pembangunan.

A. HTI BERPOTENSI MENGANCAM STABILITAS NEGARA

Kuatnya paham Islam dalam ranah pemahaman dan politik global mendorong munculnya berbagai gerakan politik Islam, yang mengukur semua berbagai kehidupan umat dengan ketentuan-ketentuan yang di buat Tuhan, cara pandang ini kemudian di ekspresikan dalam gerakan politik ideologis. Hal ini yang membuat muncul interpretasi gerakan politik Islam yang

⁶⁴Detik.com diakses tanggal 24 April 2018 pukul 21.00

menyelipkan nama Tuhan dalam bentuk pengejawantahan spiritualitasnya.

Dalam situasi di Indonesia, gerakan politik Islam tidak lepas dari kondisi sosial, politik dan keagamaan yang plural yang terus berkembang. Dari beberapa unsur tersebut sehingga mampu melahirkan corak pemikiran Islam yang fundamental, bahkan radikal, yang menyebabkan spiritualisasi Islam politik yang berkembang merupakan akar dari kran terbentuknya demokrasi kemudian menjadi ajang pertarungan berbagai wacana, persepsi, dan menjadi simbol tradisi yang terus mengalami transformasi seiring dengan kondisi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik lagi, fenomena transformasi spiritualitas Islam politik juga terjadi pada gerakan politik transnasional yang dikembangkan oleh HTI. HTI kemudian mengemaskan Ideologi khilafah yang semakin terwujud namun di sisi lain gerakan penolakan terhadap ideologi ini semakin nampak di masyarakat. Walaupun beberapa riset mengatakan bahwa ideologi yang dikembangkan oleh HTI adalah ideologi Utopis yang tidak akan tercapai kapanpun.

1. Ancaman Dalam Konteks Politik Demokrasi

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyatnya di dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, Undang-Undang 1945 mengalami beberapa kali perubahan

sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan.⁶⁵ Pada dasarnya Demokrasi sebagai nilai dibangun diatas tiga pilar. *Pertama*, Kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreatifitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat, demokrasi juga di topang pilar *kedua*, Pluralisme. Kebebasan perlu di iringi dengan penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan. Sedangkan pilar *Ketiga* dari demokrasi adalah adanya simpul pengikat. Dalam kaitannya dengan Indonesia pilar ketiga ini adalah toleransi.⁶⁶

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Sejak pemerintahan Orde Baru “Demokrasi Pancasila” merupakan sistem yang sejalan dengan ideologi negara. Pada awal rezim Orde Baru terciptanya harapan baru dan melakukan pembangunan di segala bidang seperti, pelita I, II, III, IV, V dan berhasil menyelenggarakan pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992. Perjalanan demokrasi tersebut mengalami banyak tantangan sehingga pada akhirnya terjadinya peristiwa gelombang demonstrasi yang begitu besar menuntut presiden Soeharto untuk turun dari kursi presiden.

Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto. Maka

⁶⁵ Kurniawan, Gadug. *Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi*. Hal. 95

⁶⁶ Ibid hal. 109

Indonesia memasuki suasana kehidupan yang baru. Kebijakan reformasi sudah mulai berjalan di semua aspek kehidupan masyarakat. Puncak dari reformasi ini ditandai dengan di amandemennya UUD 1945 karena di anggap sebagai sumber utama kegagalan rezim Orde Baru. Dari itu kemudian pemerintah terus berusaha merancang sebuah konsep demokrasi di Indonesia supaya terwujudnya demokrasi yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Indeks demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2017, di mana terjadi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan kualitas demokrasi. Pilkada serentak tersebut dinyatakan sukses karena berlangsung aman, damai dan lancar, yang memebrikan bukti bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik.

Hampir semua negara di dunia ingin membangun pemerintahan yang demokrastis, untuk mendapatkan legitimasi politik yang kuat secara internal, dan mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa kekuasaan yang di dadarkan itu sah karena melalui proses demokrasi yang prosedural. Karena secara praktis demokrasi adalah cara untuk menetapkan otoritas di tangan rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpin.⁶⁷

Demokrasi juga bukan satu-satunya sistem yang sempurna, demokrasi hanya menawarkan bentuk

⁶⁷ Shobron Sudarno, *Islam dan denokrasi: Implementasi dalam gerakan Islam Indonesia*, hal. 54

pengelolaan kekuasaan yang disertai dengan kontrol dan koreksi dari kekuasaan, dari segala bentuk ketidakadilan terhadap kehidupan masyarakat.

Di dalam Pemikiran Islam ada berbagai perbedaan dalam memahami demokrasi, salah satunya adalah Muhammadiyah. Sejak awal kelahirannya pada tahun 1912 selalu mengambil keputusan melalui musyawarah sebagai bukti nyata terhadap keterlibatan langsung para anggotanya, Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, tidak pernah memaksakan kehendaknya, dan selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Begitupun dalam pemilihan kepemimpinan persyarikatan digunakan dalam pemungutan suara, *one man one vote*. Dalam anggaran dasar 1912 dijelaskan dalam pasal 6: Hoofdbestuur dipilih dalam perkumpulan umum dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Pasal 8 di tentukan bahwa segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak diantara sekutu yang hadir dan memang berhak mempunyai suara.⁶⁸

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdiri tahun 2002 sebagai pendatang baru dalam bingkai perpolitikan Indonesia. Menurut PKS, demokrasi dalam pengertian barat tidak seluruhnya dapat di adopsi kedalam Islam. Namun hidup ini harus melihat kenyataan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. PKS berpandangan bahwa partai politik itu bagian dari demokrasi, dari situ kemudian PKS

⁶⁸ Priksa Mh. Djaldan Baidawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985* dalam Shobron Sudarno, *Islam dan demokrasi: Implementasi dalam gerakan Islam Indonesia*, hal. 62

ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Jadi PKS merupakan bagian dari demokrasi, karena menurut partai ini praktek tentang urusan-urusan kepentingan masyarakat itu dinamakan bagian dari demokrasi.⁶⁹

Namun berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Organisasi yang memiliki slogan Khilafah ini menolak keras terhadap sistem demokrasi, dengan alasan bahwa istilah demokrasi tidak dikenal dalam Islam sehingga harus di tinggalkan. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir Mengatakan bahwa istilah demokrasi merupakan istilah asing yang mempunyai makna bertentangan dengan Islam, maka istilah tersebut tidak dapat digunakan.⁷⁰ Di dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. dari pemikiran yang di sampaikan pendiri HT tersebut bisa dikatakan sangat kontradiktif dengan konstitusi negara yang berkaitan demokrasi. Selain itu, gagasan kedaulatan ada di tangan rakyat merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan dan kedaulatan tuhan. Karena menurutnya negara Islam harus berdasarkan prinsip musyawarah bukan demokrasi. Hukum-hukumnyapun syariah Islamiyah yang telah sempurna.⁷¹

HTI juga berpandangan bahwa istilah demokrasi merupakan Istilah yang datang dari dunia Barat dan

⁶⁹ Ibid Hal 63

⁷⁰ Muhammad Shiddiq Al-jawi, *Mengkritisi Teo-Demokrasi* dalam *Jurnal Islam dan denokrasi: Implementasi dalam gerakan Islam Indonesia*. Hal. 59

⁷¹ Ibid Hal.60

memiliki nilai- nilai sendiri sedangkan Islam tidak mengenal Demokrasi. Termasuk pemikiran politik dari orang-orang yang menggagasnya. Sama halnya dengan istilah Teo-Demokrasi yang di usung oleh Al-Maududi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak jelas antara pemegang kedaulatan (menetapkan hukum) dan pemegang kekuasaan (melaksanakan hukum). Menurut M. Ismail Yusanto pimpinan HTI, pemaksaan demokrasi untuk di hubungkan dengan Islam sebuah kekeliruan, karena hanya akan menjauhkan arti demokrasi dari aslinya dan telah melakukan distorsi makna sesuai dengan keinginan orang yang mendefinisikan.⁷²

Kedaulatan di tangan rakyat lewat perwakilan anggota DPR, dan sabagai salah satu tugasnya membentuk Undang-Undangan tidak sejalan dengan pemikiran HTI yang menganggap kehendak paling tinggi untuk menetapkan hukum di tangan Allah SWT, dan hukum-hukmnyapun adalah hukum Allah yakni Syariah. Sehingga Sistem demokrasi yang di kembangkan oleh Indonesia saat ini murut HTI adalah sistim kufur.

Melihat kondisi Indonesia yang begitu beragam dan Pluralis, maka keberadaan ideologi yang dikembangkan oleh HTI ini sangat mengganggu terhadap kondisi politik dalam sebuah negara,⁷³ karena beberapa gejala-gejala politik yang mengancam sebuah negara berasal dari gangguan politik, ideologi, sosial ekonomi dan militer.

⁷² Ibid Hal.64

⁷³ Pernyataan Frans Sinatera, kepala Seksi Pendaftaran Ormas. Dalam sesi wawancara di Kantor kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kalau hal ini bisa diatasi maka akan terwujudnya rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, roda pemerintahan juga bisa berjalan dengan lancar sehingga kegiatan di sektor pembangunan dan perekonomian mengalami pertumbuhan.

Dalam rangka membangun Indonesia yang demokratis dan berkemajuan. Maka sistem demokrasi merupakan satu-satunya pilihan bangsa Indonesia. Namun sistem ini tetap mengedepankan pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila, yakni sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid). Karena sila ini sesungguhnya sudah cukup jelas dan tepat untuk dijadikan filter dalam menerima ataupun tidak menerima sistem atau ideologi yang masuk dalam lini kehidupan di masyarakat. Bentuk perwakilan yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia merupakan pilihan yang terbaik untuk bangsa dan tidak bertentangan dengan Islam.

Dalam hal memilih pemimpin secara langsung sebagaimana yang telah dilakukan di Indonesia, itu da dasari dengan pilihan-pilihan yang bertanggungjawab, tidak hanya untuk masa depan bangsa juga bertanggungjawab kepada Allah SWT. Karena kelak apa yang kita lakukan akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wakil rakyat telah melewati proses musyawarah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Landasan teologis semacam ini merupakan pedoman dalam kehidupan demokrasi.

2. Ancaman Terhadap Partai Politik

Tujuh belas tahun silam, tepatnya pada Bulan April tahun 2001, Tempo menerbitkan satu buah berita berisi pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan Hakim Agung yaitu Prof..Dr. Muladi SH yang menurutnya bahwa pemberlakuan syariat Islam adalah sesuatu yang wajar. Menurut Muladi, syariat Islam atau hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi bisa menjadi bagian dari hukum nasional. Ia kemudian menegaskan bahwa “Syariat seharusnya menjadi faktor yang memengaruhi hukum nasional, dan bukan sebaliknya”.⁷⁴

Sengaja peneliti ilustrasikan hasil wawancara lama di atas dengan seorang tokoh publik sebagai gambaran bahwa pejabat publik yang idealnya memiliki wawasan kebangsaan dan berpikir di atas semua golongan namun faktanya tidak semanis yang dibayangkan. Maklum, lantaran selama ini usulan semacam itu hampir tak mendapatkan tempat karena dilontarkan oleh kelompok-kelompok Islam yang secara simplistis disebut “kaum fundamentalis”. Pernyataan Mulyadi tersebut tentu saja bak angin segar bagi kalangan yang selama ini memperjuangkan gagasan penerapan Khilafah atau Syariat Islam di Indonesia.

Tujuh belas tahun setelah itu, salah satu pegiat agama yang digandrungi di media sosial yakni Felix Siauw menyatakan pernyataan serupa dengan pembawaan yang berapi-api ia mengatakan bahwa khilafah harus tegak dan

⁷⁴Tempo.id. Diakses tanggal 27 April 2018 pukul 16.00

jalannya adalah melalui dakwah. “Bukan karena partai, bahwa Islam itu tinggi dari segala-galanya”, tegasnya di akun sosial media pribadinya. Felix Siauw adalah salah satu aktivis yang memperjuangkan berdirinya kekhilafahan di bawah bendera HTI. Namun pernyataan Felix Siauw tadi terkesan dilematis, lantaran salah satu koleganya dalam berdakwah, Ismail Yusanto yang merupakan fungsionaris HTI mengaku belakangan HTI merupakan partai yang statusnya ekstra-parlementer.⁷⁵

Pernyataan keduanya cukup kontras, tetapi ungkapan terakhir bisa ditemukan sumber rujukannya. Hadirnya HTI sendiri di Indonesia dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap partai-partai di Indonesia, terutama yang terang-terangan mengklaim membawa misi Islam. Mereka menilai urgensi partai politik yang ada di Indonesia hanya terbatas pada berdirinya organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan (*jam'iyat*) yang mengacu pada amal sosial (*khairriyah*), seperti mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat penampungan orang-orang lemah, serta membantu berbagai kegiatan sosial. Pada umumnya gerakan-gerakan seperti ini terbatas pada aspek sosial semata, lebih lanjut lagi gerakan ini cenderung bersifat kompromistis terhadap negara⁷⁶. Misi utama HTI adalah melakukan perbaikan secara total di bawah panji-panji Islam yang sifatnya monolitik.

⁷⁵Kumparan.co.id . Diakses tanggal 27 April 2018 pukul 21.00

⁷⁶Al-Amin, A. R. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah*. Yogyakarta: LKiS.

Partai politik yang berhaluan Islam di Indonesia tidak demikian, sekalipun mengutamakan nilai-nilai Syariah, visi untuk mengubah ideologi negara tidak tercantum dalam platform politik mereka. Sebagai contoh adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam situs resminya, mereka mengklaim diri sebagai partai Islam namun tetap berkomitmen kepada sistem demokrasi dan nasionalisme sebagai falsafah negara. Begitu pula dengan Partai Bulan Bintang (PBB), partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini adalah penerus dari Partai Masyumi, namun menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai arah kebijakannya.

Sebagaimana klaim tunggalnya, partai-partai dengan kecenderungan di atas belumlah cukup –jika tidak mengatakan salah-. Klaim tersebut terletak pada unsur yang paling fundamental, yaitu asas. HTI mengklasifikasikan asas yang benar menurut mereka. Pertama, munculnya seorang ideolog yang mempunyai kapabilitas dalam merumuskan ideologi (*mabda*) gerakan. Gerakan ini diramalkan akan berkembang sebagai sel atau fase pertama. Kedua, *halaqah* awal ini merupakan gerakan yang berupa embrio dan teralienasi dari masyarakat luas. Ketiga, *halaqah* awal mempunyai pemikiran yang kompleks, mendalam, dan mengakar. Pada fase ini kader sudah mampu melihat realitas dan meresponsnya secara elegan dengan cara mengkaji serta merumuskannya. Keempat, para pengikutnya harus konsisten dengan kaidah berpikir yang sudah ditentukan terkait dengan aktivitas yang

diarahkan. Tahapan ini menuntut kadernya untuk progresif dan cerdas dalam mengubah keadaan, bukan keadaan yang akan mengubah pemikiran.

Kelima, adalah turunan dari tahap keempat. Di mana kader harus mampu memberdayakan diri dengan iman sebagai tolok ukurnya serta cekatan sehingga diharapkan mampu menggerakkan partai secara optimal. Keenam, fokus untuk mengubah masyarakat melalui kajian mendalam terhadap individu. Ketujuh adalah akidah yang benar dan thaqafah partai yang matang. Kedelapan, masyarakat merupakan madrasah besar. Artinya partai dituntut untuk membangkitkan akidah yang benar. Dalam pandangan HTI, partai-partai saat ini gagal dalam mentransformasikan Islam yang sesungguhnya. Keshahihan atau tolok ukur partai Islam adalah apa-apa yang sudah mereka rumuskan seperti yang peneliti ulas di atas. Atas dasar itu pula mereka menyebut bahwa partai-partai Islam belakangan termakan oleh politik inklusi Barat sehingga menjadi lemah⁷⁷. Dari rumusan di atas pulalah kita dapat memahami bahwa klarifikasi partai yang ideal adalah partai yang tegak di atas akidah Islam, mengadopsi hukum-hukum Syariat dan memperjuangkan Khilafah. Sebaliknya, partai yang menyeru pada ideologi non-Islam seperti nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, dan komunisme merupakan partai yang haram. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa partai-partai di Indonesia sekalipun landasan normatifnya

⁷⁷ Al-Amin. 2012. *Hizbut Tahrir di Mata Barat*. hlm.48

adalah Islam jika ia masih menyeru pada ideologi *liyan* maka ia tidak legal/absah sebagai sebuah partai.

Spesifikasi yang sedemikian ketat dengan elaborasi kaidah di atas tentu saja bersinggungan dengan ideologi bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi serta Pancasila sebagai sebuah kesepakatan bersama. Ia juga merupakan ancaman terhadap demokrasi kita karena memuat nilai-nilai yang cenderung diskriminatif, dengan menihilkan heterogenitas masyarakat. Syarat ketat dan kompleks yang diterapkan oleh HTI di atas hanya mungkin jika Indonesia adalah negara yang masyarakatnya homogen. Faktor lain adalah ketidakmampuan partai itu sendiri dalam menyejahterakan masyarakatnya. Dalam survey yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2017, 51,3% masyarakat Indonesia menganggap bahwa partai politik itu buruk⁷⁸. Persoalan ini bisa menjadi kesempatan bagi HTI untuk menjaring kader dalam rangka mengembangkan partainya. Dengan asumsi yang demikian, tentu saja ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi tegaknya demokrasi kita yang berpangkal pada partai politik sebagai sebuah tolok ukur kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, peluang untuk memanfaatkan legitimasi agama sangatlah besar dengan mengampanyekan khilafah. Penurunan elektabilitas partai serta kegigihan mereka dalam mengampanyekan ideologinya bisa membajak dan menyandera demokrasi.

⁷⁸Kompas.com Diakses tanggal 27 April 2018 pukul 19.00

3. Gagasan Unifikasi Kesatuan Tunggal Kepemimpinan

Sebagai partai politik yang berjejaring internasional, HTI tak henti-hentinya mengampanyekan khilafah sebagai satu-satunya institusi politik yang legitimatif secara agama dan solusi bagi kebangkrutan moral umat. Propaganda yang sistematis ini terus menerus diamplifikasi sekalipun khilafah belum pernah diterapkan di era kontemporer. HTI sendiri mengakui bahwa menegakkan khilafah adalah pekerjaan yang tidak mudah, bahkan dipenuhi intrik, konspirasi, dan fitnah⁷⁹.

Junita Arliani (2017) pernah menuliskan di dalam sebuah jurnal bahwa salah satu misi HT dalam konteks internasional adalah untuk memperbaiki struktur sosial yang ada di dalam tatanan sebuah negara. HT, hampir di tiap negara dianggap sebagai sebuah ancaman yang nyata dan serius. Gabungan intelijen AS (*national intelligence council's/NIC*) menjelaskan skenario kemunculan Khilafah pada tahun 2020. Khilafah diklaim sebagai tantangan karena penolakannya terhadap fondasi dan sistem negara, hukum, dan politik yang sudah berlaku selama ini⁸⁰. Media terkemuka di Inggris, EDHUSEIN bahkan menulis sebuah laporan bahwa gerakan Islamis seperti HT sebagai ancaman di Inggris⁸¹.

⁷⁹Al-Wa'ie "Hizbut-Tahrir: Islam Political Insurgency, hlm.54.

⁸⁰ National Intelligence Council's, Mapping the Global Future", dalam *Membongkar Proyek Khilafah*, Maret, 2012. hlm.170.

⁸¹ Yusanto, ED HUSEIN: Pengembara yang Sia-Sia," dalam *Membongkar Proyek Khilafah*.2012. hlm.173.

Cita-cita besar yang diusung oleh partai politik bertuliskan lafadz Arab ini berangkat dari rumusan Daulah Islamiyah yang menyerukan pada bersatunya wilayah-wilayah Islam dalam satu komando kepemimpinan. Konsep ini di Indonesia baru dikenal pada tahun 1990-an dan cukup mendapatkan respons positif oleh masyarakat pada tahun 2000, di mana HTI menyelenggarakan event perdana bertajuk Konferensi Internasional *Khilafah Islamiyah* di Senayan, Jakarta⁸². Sekitar 5000 orang berkumpul memadati stadion tersebut, dan kemudian secara kontinu melakukan aksi demonstrasi dengan sasaran Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), membawa isu kemanusiaan di Timur Tengah.

Pada tahun 2015, aksi dengan tema serupa juga dilakukan, namun kali ini dirancang secara serentak di 36 kota besar di Indonesia, dengan mengusung semangat “Bersama Umat Tegakkan Khilafah”⁸³.

Memerhatikan serangkaian aksi maraton di atas serta pola perkaderan, formulasi, dan mekanisme organisasinya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa HTI melakukan konsep unifikasi melalui ekspansi kekuasaan dengan otoritas tunggal. Jean Francois Mayer, seorang pengamat perkembangan agama-agama dunia, memberikan asumsinya mengenai HTI sebagai satu-satunya partai internasional. Mereka mempunyai cabang di mana-mana⁸⁴,

⁸² Nusantaranews.com Diakses tanggal 27 April 2018 pukul 21.00

⁸³ Hizbuttahrir.com Diakses tanggal 27 April 2018 pukul 21.00

⁸⁴“Al-Amin, 2012. *Membongkar Proyek Khilafah*

termasuk di antaranya adalah negara-negara Barat, dengan metode yang kurang lebih sama.

Hal yang sama juga ditemukan di Indonesia, melalui berbagai aksi serta konferensi di berbagai daerah, HTI memobilisasi umat dari berbagai kawasan dan daerah untuk tergiur dalam buaian janji Khilafah yang sekilas nampak utopis tersebut. Berdasarkan kasus di atas, dapat dimengerti bahwa upaya penegakan Khilafah merupakan komitmen yang serius dan jangka panjang yang bisa saja kelak akan menemui keberhasilannya.

Proses unifikasi ini adalah implementasi dari apa yang disebut sebagai Pan-Islamisme, yakni mengusung cita-cita mewujudkan Khilafah Islam di dunia. Klaim ini dibenarkan oleh Ismail Yusanto, sebagai juru bicara dari HTI, ia mengatakan bahwa Indonesia kelak akan menjadi pusat kekhalifahan. Kemudian ia menambahkan bahwa ada keuntungan sendiri jika cita-cita tersebut terwujud karena luas wilayah Indonesia secara geografis akan bertambah⁸⁵. Selain itu Pan-Islamisme sebagai bagian dari agenda politik, ia juga menjadi medium bagi silaturahmi antar umat Islam di Indonesia dan dunia. Proses unifikasi ini adalah fase awal demi terwujudnya kekuasaan yang absolut, yakni penolakan terhadap separasi kekuasaan, semua aspek difusikan pada pemimpin tunggal.

⁸⁵CNN.Com Diakses tanggal 27 April 2018 Pukul 09.00

B. ANCAMAN TERHADAP STABILITAS KEAMANAN

Meskipun memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, dan berdiskusi serta mengklaim memiliki lebih dari dua ribu orang pengikut.⁸⁶ HTI tidak lantas kemudian mendapatkan dukungan moral, sebaliknya ia justru dikecam karena dianggap mempromosikan pendirian negara Islam Khilafah. Penolakan tersebut umumnya mengambil dua pola umum, yakni dengan berdemonstrasi dan dicounter melalui pengajian-pengajian kecil di masjid atau mushala. Untuk yang terakhir ini sikap tegas tersebut dicontohkan serta dipraktikkan langsung oleh dua ormas besar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.⁸⁷

Selain itu, hasil riset yang dirilis oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia menolak ide pendirian negara berdasarkan teokrasi, hanya 3% yang memberikan dukungan, dan sisanya abstain. Alasan penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan secara teologis, pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa, dan disinyalir dapat memunculkan semangat intoleransi. Ketiganya bernuansa destruktif dan dianggap meresahkan. Sikap pemerintah yang proaktif dalam membubarkan HTI dalam konteks ini dianggap sudah sesuai dengan visi kebangsaan. Pergolakan serta resistensi di masyarakat akibat meluasnya gerakan HTI ini tidak saja melemahkan sendi dalam bernegara, tetapi ia juga menguras energi pemerintah yang semestinya disalurkan pada sektor produktif, seperti pendidikan

⁸⁶Republika.co.id Diakses tanggal 27 April 2018 Pukul 09.00

⁸⁷Al-Amin. 2012 Hal. 47. Diakses tanggal 27 April 2018 Pukul 09.00

dan pembangunan fisik misalnya. Upaya pelemahan terhadap HTI oleh masyarakat, baik dengan propaganda anasir melalui pengajian-pengajian serta demonstrasi adalah tindakan yang menurut mereka cukup tepat. Masyarakat sudah memahami betul bahwa misi utama HTI adalah merebut kesadaran politik. Sebagaimana dalam definisi politik mereka:

“Politik adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak negara dan umat. Negara yang langsung terjun mengurus umat dan yang akan memonitor serta mengoreksi negara”.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa politik, negara, dan umat memiliki peran yang cukup sentral. Definisi politik menurut perspektif HTI tersebutlah yang disadari secara penuh oleh masyarakat bahwa ide yang diilhami oleh ormas berlafadz Arab ini secara diametral berbeda dengan visi kebangsaan, terlebih lagi kasus ini menunjukkan bahwa intoleransi sudah cukup mengakar di Indonesia, sehingga penolakan tak terelakan.

1. Genealogi Hti Dan Terorisme

Berbagai literatur yang berkaitan dengan aktivitas serta pola perkaderan HTI belum ada yang menunjukkan bahwa gerakan ini mengarah pada aksi terorisme ataupun beberapa di antara kadernya yang terlibat tindakan destruktif tersebut. Bahkan dalam pengakuannya, HTI menempuh jalur damai dalam upayanya menegakkan Khilafah sebagai sebuah sistem negara. Penyebaran ideologi pun melalui interaksi yang dibagi menjadi dua tipologi: pertama adalah pengaderan yang terkonsentrasi yang bertujuan untuk

menumbuhkan rangka gerak Hizbut Tahrir Indonesia, lalu kedua adalah pembinaan kader secara kontinu⁸⁸.

Pola di atas tidak hanya menunjukkan formula penyebaran dan konsep metodologinya, tapi bisa disimpulkan bahwa gerakan ini berbeda dengan organisasi radikal-brutal seperti *Islamic State of Iraq* (ISIS), misalnya. Terdapat titik singgung yang tebal antara keduanya baik dari sisi ideologis maupun pola penyebarannya.

Namun, sebagaimana laporan yang diterbitkan oleh Geotimes, HTI merupakan organisasi yang rentan menjadi ladang persemaian paham terorisme, oleh karenanya harus dilumpuhkan sejak dini⁸⁹. Hizbut Tahrir meskipun memiliki wajah yang berbeda dengan ISIS namun tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan dukungan secara moril terhadap terorisme. Misalnya saja HT di Suriah dalam laman daringnya mereka mendukung secara politis semua aksi militer terhadap kelompok anti-Bashar Hafez al-Assad tanpa intervensi dari asing meskipun menolak untuk ikut andil dalam berperang⁹⁰.

Sulit mengatakan bahwa HTI merupakan rekan potensial yang bisa “ditempel” oleh organisasi teroris demi mencapai cita-cita pendirian Daulah Islamiyah. Namun faktanya, kesamaan tujuan memudahkan infiltrasi terhadap teroris karena cita-cita yang diusung hampir mirip, yakni

⁸⁸Hidayat. 2014. *Kontroversi Khilafah* . Mizan: hlm. 21.

⁸⁹Geotimes.co.id Diakses tanggal 27 April 2018 Pukul 09.00

⁹⁰Geotimes.co.id Diakses tanggal 27 April 2018 Pukul 09.00

negara berdasarkan Syariah,⁹¹ meskipun berbeda dari segi penerapan. Ditambah lagi HTI adalah organisasi transnasional yang sewaktu-waktu bisa saja mengalami pergeseran paradigma politik, mengingat Ukhuwah Islamiyah tidak memandang sekat satu sama lain.

Kemiripan lain adalah HTI dan ISIS memiliki pandangan keagamaan yang monolitik. Artinya keduanya menutup kemungkinan adanya aliran yang berbeda dari keyakinan mereka. Pandangan seperti ini mengejawantahkan sikap aroganisme dan menutup fakta bahwa perbedaan di tubuh Islam itu merupakan sebuah keniscayaan. Alih-alih ia akan kesulitan untuk hidup dan berkembang di wilayah Nusantara dengan berbagai unsur budaya serta agamanya yang beragam.

Selain itu kesamaan lain adalah Hizbut Tahrir dan ISIS memaknai totalitas dalam berislam dengan tolok ukur tegaknya Khilafah. Khilafah adalah bagian intrinsik bagi keduanya sehingga wajib dan tidak dapat ditinggalkan. Meskipun sulit untuk mengaitkan HTI dan organisasi teroris namun kemiripan keduanya dalam mengusung ide Islam sebagai pijakan dalam seluruh aspek tak bisa dihilangkan begitu saja. HTI tumbuh dari angin demokratisasi di dunia Islam yang memberikan ruang bagi mereka. Tetapi di sisi lain dikhawatirkan apa yang disebut Zuhairi Misrawi sebagai demokrasi versi kaum Islamis⁹².

⁹¹Pernyataan Frans Sinatera, kepala Seksi Pendaftaran Ormas. Dalam sesi wawancara di Kantor kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 25 November 2017

⁹²Zuhairi Misrawi, Hidayat, *Kontroversi Khilafah*, (Mizan, 2014)

Demokrasi yang dibajak secara prosedural, tetapi substansinya dikosongkan. Kekosongan ini yang kemudian rentan dan berpotensi diambil alih oleh gerakan kombatan seperti ISIS. Bahkan sebagaimana hasil rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hizbut Tahrir termasuk dari delapan organisasi masyarakat yang anggotanya sedikit banyaknya dipengaruhi ideologi atau paham *Islamic State of Iraqw and Al Sham (ISIS)*⁹³. Dalam konteks ini penulis bisa berkesimpulan bahwa meskipun tidak ditemukan justifikasi pembenaran berkaitan dengan sejarah, pola rekrutmen serta persebarannya yang kemudian mengarahkan HTI pada ISIS atau organisasi terror lainnya. Namun fakta kemiripan di atas bisa memungkinkan adanya “kanalisasi ideologi” dengan menempatkan HTI sebagai mediumnya.

2. Dokumen Pengambil Alihan Kekuasaan

Pan-Islamisme yang didengungkan oleh HTI tidak hanya terbatas pada perasaan sebagai umat yang satu, namun lebih dari itu yakni terwujudnya cita-cita politik bersama. Persatuan umat dalam kerangka politik saat ini terasa sangat urgen mengingat kondisi keterpurukan dan keterbelakangan umat Islam di dunia, terutama di Indonesia belakangan terakhir.

Satu-satunya gerakan yang efektif untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan umat menurut HTI adalah demonstrasi atau

⁹³Tempo.co Diakses 8 April 2018

menyampaikan aspirasi, karena penyampaian aspirasi di muka umum sudah diatur dalam konstitusi. Adapun rentetan aksi tersebut diantaranya. Pada tanggal 13 Januari 2002 ribuan aktivis dari berbagai daerah melakukan *longmarch* di Surabaya dengan tuntutan mengimplementasikan Islam secara *kaffa* (Islam secara totalistik). Kemudian Pada tanggal 3 dan 5 Agustus 2002 demo di gedung DPR/MPR, menuntut perubahan konstitusi untuk mengadopsi syariat Islam, Pada tanggal 14 September 2004 melakukan demonstrasi di Makassar dengan tuntutan, Menolak pemimpin sekuler dan anjuran penegakan hukum syariah. tanggal 24 Oktober 2004 pawai ribuan aktivis di Istana Merdeka menuntut, deklarasi pemberlakuan syariat Islam dan sistem Khilafah, tanggal 8 April 2007 ribuan massa menghadiri konvensi umat Islam Jakarta di lapangan tennis indoor Senayan dengan rekomendasi penegakan syariah Islam dalam kepemimpinan Gubernur Jakarta 2007-2012 dan Pada tahun 2017 ikut ambil dalam berbagai aksi yang bersifat berpolitik dan mempengaruhi pemerintahan yang ada. Semua demonstrasi yang dilakukan HTI disampaikan secara santun dan tidak anarkis seperti merusak fasilitas umum, ataupun bentrok dengan masyarakat.⁹⁴

Keterpurukan umat Islam dalam konteks Indonesia saat ini, sebagaimana klaim Felix Siauw adalah keengganan untuk melawan. Ia kemudian mencontohkan bahwa penguasa di Indonesia berbuat lalim terhadap Islam, dengan mencontohkan hukuman ringan terhadap seorang penista

⁹⁴ Yunanto, Sri. *Khilafah Versus NKRI* .hal.34

agama⁹⁵. Ia juga menebalkan narasi dengan memosisikan Islam sebagai pihak yang selalu diintimidasi. Terakhir ia menggugat dengan menghadirkan pernyataan yang provokatif bahwa Islam harus mengatur tata cara bernegara jika tak kemudian hal ini terulang.

Pernyataan terakhir menurut peneliti adalah penegasan sekaligus afirmasi seorang aktivis HTI kepada umat agar tidak menjauhi politik, bahkan harus meraihnya demi terciptanya Indonesia yang berlandaskan sistem Islam. Felix adalah satu tokoh HTI yang mengampanyekan Khilafah dengan cara dakwah ala Milennial –melalui media sosial- namun dengan tujuan yang relatif sama yakni negara Islam.

Sebagaimana ditemukan dalam landasan normatifnya, Hizbut Tahrir berfungsi untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui Khilafah dan sifatnya adalah kewajiban *aqidah Islamiyyah*. Posisinya di agama adalah Fardhu Kifayah⁹⁶. Posisi Felix pada konteks ini adalah pada apa yang disebut legitimasi konsep, yaitu menghegemoni intelektual dengan mengeksplorasi dalil-dalil agama⁹⁷ yang bertujuan agar umat meyakini kebenaran konsep itu.

Bagi mereka mendirikan Khilafah adalah suatu kewajiban sehingga setiap anggota atau kader dituntut untuk membuat perubahan sekecil apapun itu. Saat ini narasi presiden yang dirasa mengintimidasi Islam cukup diamplifikasi oleh HTI melalui Felix Siauw dalam akun

⁹⁵ Potalislam.id Diakses 28 April 2018

⁹⁶ Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah* 2012 hlm.32

⁹⁷ Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah* (2012) hlm.105

media sosialnya. Bermodalkan pengikut yang cukup banyak ia memulai kampanye tentang spesifikasi pemimpin Muslim yang ideal serta membandingkannya. Tudingan seperti pemerintah “sekuler”, meniadakan agama, menjual negeri, merendahkan ulama⁹⁸, jamak sekali ditemukan di akun pribadinya maupun pernyataannya di berita daring.

Upaya yang dilakukan HTI sebenarnya sah-sah saja dalam iklim demokrasi, karena ia adalah kritik yang merupakan bagian integral dari dialektika. Namun kritik tadi sejatinya tidak mengarah pada kebijakan-kebijakan pemerintah, namun hanya sekadar tudingan kosong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui data-data yang akurat.

Tudingan demi tudingan tadi juga mengindikasikan bahwa HTI ingin adanya perpindahan kekuasaan, perubahan yang lebih fundamental, terutama menyangkut konsep dan sistem negara. Ketidakpuasan terhadap pemimpin yang bias dengan infiltrasi politik diperlihatkan secara gamblang. HTI sendiri adalah organisasi yang tergabung dalam formasi Alumni 212 yang salah satu tujuannya bias dengan kepentingan politik. Salah satu traktat yang bisa menjelaskan ini adalah bahwa HTI menekankan pada aspek interaksi sebagai pijakan misinya, demi memperoleh dukungan bahkan menjaring anggota⁹⁹. Kritik tadi juga sesuai dengan konstruksi Khilafah ala HTI yang serangannya tertuju pada seluruh bentuk interaksi

⁹⁸Jawapos.com Diakses 28 april 2018

⁹⁹Al-Amin. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah* hlm. 56

antara penguasa dan umat Islam yang terkait dengan kemaslahatan umat. Pada fase ini aturan-aturan rezim dinarasikan sebagai penindas dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

3. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara Pancasila yang sangat mengakui kemajemukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek budaya, politik, agama, ras, suku, bahasa dan etnis. Keberagaman ini memerlukan suatu kerangka dasar konstitusional, supaya keberagaman itu dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya membangun kehidupan keagamaan yang plural dan dinamis adalah dengan membangun wawasan kehidupan keagamaan yang mampu menghargai dan menghormati keragaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki masing-masing pemeluk agama.¹⁰⁰

Munculnya beberapa kelompok Islam yang masuk dalam era reformasi, melahirkan berbagai paham-paham radikal yang memiliki kepentingan untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi Islam dalam bentuk *Khilafah Islamiyah* atau negara Islam. *Khilafah Islamiyah* menurut HT adalah kepemimpinan unum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, guna menerapkan hukum-hukum syara', dan mengemban dakwah Islamiyah keseluruhan

¹⁰⁰ Dahlan, Moh *Eksistensi Negara Pancasila Dalam Paradigma Ushul Fiqih Progresif* Hal. 2

alam.¹⁰¹ Kelompok tersebut memiliki wacana keagamaan yang konservatif yang menolak adanya pemahaman keagamaan yang plural. Hasil penelitian Zaki Mubarak menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia telah membentuk suatu sistem ideologi tersendiri yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan mereka hendak menggantikannya dengan ideologi Islam. Agenda politik pendirian Khilafah tersebut lahir dari paradigma ushul fikihnya yang bersifat konservatif dan literaistik-lokalistik.¹⁰²

Di sisi lain hasil penelitian Mardani menyebutkan bahwa pembangunan hukum kenegaraan di Indonesia hanya bisa terwujud secara Konstitusional dan berdayaguna jika merujuk kepada sistem hukum nasional yang mana materi hukum dasarnya secara keseluruhan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, bukan pada ideologi sistem kenegaraan Islam atau *Khilafah Islamiyah* yang pernah berkembang di Timur Tengah. Oleh karena itu nilai-nilai keagamaan bangsa Indonesia yang sudah terserap dalam Pancasila dan UUD 1945 sudah mutlak dan tidak bisa tidak boleh cedrai lagi.¹⁰³

Pentingnya menjaga eksistensi negara merupakan amanat Konstitusi yang wajib dijaga oleh setiap pemimpin bangsa, agar bangsa bisa tumbuh dan berkembang dengan

¹⁰¹ Ibid hal.6

¹⁰² M Zaki Mubarak. *Genologi Islam Radikal Di Indonesia* (Jakarta: LP3S, 2008), Hal. 300-301

¹⁰³ Madani, *kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, Fak. Hukum UII, No.2 Vol. 16 April 2009, Hal 284

baik. Keberadaan negara Pancasila sebagai negara Konstitusional yang sudah menjadi kesepakatan bersama di awal kemerdekaan adalah sebuah konsensus yang sudah disesuaikan kondisi negara. Namun situasi negara saat ini yang mulai gembosi dengan pengaruh Islam fundamentalis dengan konsep negaranya menyebabkan keberadaan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertanyakan lagi legalitasnya. HTI dengan dalil-dalinya secara terbuka menyatakan menolak negara Pancasila karena tidak sesuai dengan konsep *Khilafah Islamiyah*.

Para *founding father* Bangsa telah mewariskan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai dasar-dasar ideal bagi anak bangsa dalam membangun tatanan kehidupan yang adil, tertib dan demokratis. Konstitusi negara juga secara jelas menyatakan tentang idealisme kolektif bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosila budaya. Salah satu dasar dan menjadi pedoman konstitusional dalam membangun kehidupan bangsa yang mejemuk yakni piagam madinah. Piagam madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di yathrib.¹⁰⁴ Karena piagam madinah memiliki kesamaan dengan konstitusi tertulis NKRI dan UUD 1954. Letak kesamaannya yakni sama-sama ingin mewujudkan kehidupan yang adil untuk kemaslahatan umat.

¹⁰⁴ Wikipedia.org diakses tanggal 28 april 2018 pukul 08.00

KH Abdur Rahman Wahid ketika menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menegaskan kembali bahwa negara pancasila adalah titik kompromi yang sudah tepat dan final bagi kondisi kemajemukan dan keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dalam hal ini NU tidak hanya sekedar megakui eksistensi negara Pancasila, tetapi juga sekaligus menjadikan pancasila sebagai asas organisasi NU. Dari sini kemudian kader akar rumput NU semangat mengkampanyekan kemajemukan dan keberagaman, sebagai warisan yang indah dari tuhan kepada bangsa Indonesia, pada kondisi yang lain NU juga bersikap kritis kepada kelompok yang ingin mengubah ideologi bangsa dengan ideologi khilafah seperti HTI.

Kebradaan HTI merupakan ancaman yang besar terhadap eksistensi negara karena dipandang ingin mengambil alih kekuasaan negara dan menggantinya dengan sistem Khilafah. Dengan beberapa bukti yang menunjukkan pada setiap metode dan strategi dakwah yang disebarakan HTI, seperti arahan meninggalkan sistem negara Pancasila dan ingin ingin menyatukan negara yang penduduknya mayoritas Islam untuk menjadi satu kesatuan. Beberapa bukti juga menunjukkan yakni dengan menyebarkan video-video propaganda di media sosial menyerukan ketidaksepakatan terhadap demokrasi, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Pengaruh yang lain bisa dilihat terkait dengan masalah perekrutan, konfrontasi Intelektual dan mengubah cara berfikir masyarakat untuk menerima

kekuasaan Islam ditopang dengan menciptakan kepribadian Islam. Strategi ini yang dilakukan memperbesar pendukung masyarakat untuk mendukung gerakan HTI.¹⁰⁵

KH Hasyim Asyari salah satu ulama besar serta tokoh pendiri NU, pernah menyepakati bahwa resolusi jihad salah satu perwujudannya adalah mendukung secara mutlak kemerdekaan negara. Sebagaimana saat-saat genting proklamasi ia memberikan pandangan bijaknya mengenai ayat-ayat Al Quran dan hadis, bahwa jika nilai keduanya diperas maka substansinya adalah mengajak pada persatuan, hidup bermasyarakat, dan penyelesaian masalah secara musyawarah.¹⁰⁶ Gagasan KH Hasyim Asyari tentu berbeda dengan apa yang diyakini oleh HTI. HTI menganggap bahwa sistem Khilafah merupakan sesuatu yang *absolute*. Tak sampai di situ, mereka juga mempersempit diskursus Islam itu sendiri dengan menyatakan bahwa anti terhadap Khilafah dan mendukung konsep negara bangsa sama dengan kufur terhadap agama.

Ada banyak tokoh Islam menentang ideologi yang dibawa oleh HTI untuk disebarluaskan kepada masyarakat. KH Hasyim Muzadi, Hasbullah Bakry, dan Mohammad Natsir adalah sedikit di antaranya. Para tokoh tersebut memiliki alasan yang kurang lebih sama, secara konsep karakter Khilafah yang cenderung totaliter hanya mungkin terlaksana pada wilayah geografis yang tidak terlalu luas dan masyarakat politik yang relatif homogen. Keempat

¹⁰⁵ Soedarmo (*Direktur Jendral Politik Dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri*) dalam Tempo.com tanggal 1 juni 2017

¹⁰⁶ Yunanto, Sri. 2017. *Negara Khilafah Versus NKRI*. Hal. 117

tokoh di atas selain secara konsep keagamaan memiliki keyakinan yang berbeda, faktor yang diutamakan adalah heterogenitas serta kesetaraan masyarakat Indonesia. KH Hasyim Asyari misalnya berpendapat bahwa ajaran yang diyakini oleh HTI terdapat banyak pengelompokan. Warga dengan hak asasi sempurna adalah laki-laki Muslim, perempuan Muslim tidak mendapat hak menjabat negara, bahkan non-Muslim tidak diberikan hak untuk menentukan pemimpin atau menjadi pejabat negara (Yunanto, 2017:120). Sementara KH Hasyim Muzadi kurang lebih sama, ia mencontohkan bagaimana umat Islam yang mayoritas berhubungan dengan entitas agama lain di kala itu seperti Yahudi dan kelompok masyarakat lainnya. Sementara Hasbullah Bakry dengan lugas menyatakan bahwa konsepsi negara Islam adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap *founding fathers* Indonesia.

Dari ulasan di atas menimbulkan pertanyaan yang cukup mengherankan mengapa sebagian kaum Muslim saat ini justru berusaha menghidupkan konsep Khilafah yang sudah mati ratusan tahun silam dan tidak sesuai dengan kerangka berbangsa, bernegara kita. Selain di Indonesia, para intelektual Muslim modern seperti Rasyid Ridha dan Abul A'la al-Maududi pernah mengatakan bahwa gagasan Khilafah sulit diterapkan dan cenderung utopis.¹⁰⁷Keduanya merujuk pada fase historis kegagalan Jamaluddin al-Afghani dengan gagasan pan-Islamismenya. Tidak

¹⁰⁷Assyaukanie 2007 hal.216).

mengherankan periode setelahnya pada tahun 1970-an, para tokoh Muslim sendiri mulai mengkritisi dan menolaknya.